Jurnal Riset dan Inovasi Bisnis Digital (JRIBD)
Volume 1, Issue 2, Juli 2026, Hal. 31-40
E-ISSN: 3125-0394 (Media Online)
DOI: https://doi.org/10.66785/jribd.v1i2.242

SIPANDAI: AI-Assisted Financial Information Layer untuk Memperkuat Literasi Keuangan dan Meningkatkan Minat Menabung Masyarakat pada BPR/BPRS

Randy Prandana[1], Dina Indah Permatasari[2]

[1]Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mahkota Tricom Unggul, Medan, Indonesia
[2]Dira Niaga Abadi PT, Medan, Indonesia

Corresponding Email: Prandana.randy@gmail.com[1], dina25091992@gmail.com[2]

Abstrak. BPR dan BPRS berperan dalam menghimpun dana masyarakat dan mendukung pembiayaan ekonomi lokal. Namun, informasi mengenai produk simpanan, karakteristik lembaga, dan ketentuan penjaminan belum tentu mudah dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini merumuskan SIPANDAI (Sistem Informasi Panduan Digital Berbasis AI) sebagai *AI-Assisted Financial Information Layer*, yaitu model konseptual yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu menerjemahkan informasi keuangan BPR/BPRS menjadi penjelasan yang sederhana dan kontekstual. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual berorientasi kebijakan melalui studi kepustakaan atas literatur akademik yang ditelusuri melalui *Google Scholar* serta dokumen resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan fokus publikasi 2021–2026. Analisis dilakukan melalui pemetaan tema, identifikasi kesenjangan informasi, perbandingan pendekatan terdahulu, dan sintesis konseptual untuk merumuskan komponen serta mekanisme SIPANDAI. Hasilnya berupa model empat lapisan: sumber informasi resmi, penerjemahan AI, interaksi masyarakat, serta etika dan batasan fungsi. SIPANDAI menempatkan AI sebagai penjelas informasi, bukan pengambil keputusan keuangan. Model ini menawarkan kemungkinan penguatan keterpahaman informasi dan dukungan terhadap keputusan menabung yang lebih terinformasi. Namun, pengaruhnya terhadap literasi, kepercayaan, maupun minat menabung belum diuji secara empiris. Kelayakan biaya dan replikasi juga masih memerlukan penilaian teknis serta uji coba.

Kata kunci: SIPANDAI, artificial intelligence, literasi keuangan, informasi keuangan, BPR/BPRS.

1. PENDAHULUAN

Literasi keuangan merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan masyarakat dan memperluas manfaat inklusi keuangan [1]. Di Indonesia, perkembangan inklusi keuangan telah berlangsung lebih cepat dibandingkan peningkatan literasi keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51% berdasarkan metodologi SNLIK yang digunakan OJK dan BPS. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan penggunaan layanan keuangan belum selalu diikuti kemampuan masyarakat untuk memahami karakteristik, manfaat, risiko, serta konsekuensi dari produk keuangan yang digunakan. Kondisi ini menjadikan penguatan literasi bukan sekadar agenda edukasi, tetapi bagian penting dari upaya memastikan bahwa inklusi keuangan menghasilkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan lembaga dan produk keuangan yang semakin beragam. Literasi keuangan berperan dalam kemampuan individu membuat keputusan finansial yang lebih terinformasi, sementara penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa literasi keuangan berkaitan positif dengan perilaku menabung [2]. Pada lingkungan digital, hubungan tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat memperoleh informasi keuangan melalui berbagai kanal dengan tingkat kualitas, kompleksitas, dan keterandalan yang berbeda. [3] menemukan hubungan antara *digital financial literacy* dan perilaku keuangan masyarakat milenial Indonesia, termasuk perilaku menabung, sedangkan penelitian [4] menunjukkan bahwa *digital financial literacy* berpengaruh positif terhadap perilaku menabung. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi literasi keuangan dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjembatani pengetahuan keuangan dengan keputusan finansial masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki posisi strategis karena karakteristik bisnisnya dekat dengan masyarakat dan berperan dalam mendukung pembiayaan ekonomi pada lapisan lokal. OJK melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan

Jurnal Riset dan Inovasi Bisnis Digital (JRIBD)
Volume 1, Issue 2, Juli 2026, Hal. 31-40
E-ISSN: 3125-0394 (Media Online)
DOI: https://doi.org/10.66785/jribd.v1i2.242

Industri BPR dan BPRS 2024–2027 menegaskan bahwa industri BPR dan BPRS diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada lapisan bawah sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Secara empiris, sektor ini juga memiliki basis dana masyarakat yang signifikan. Pada Juni 2025, total aset BPR dan BPRS mencapai sekitar Rp230,38 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sekitar Rp161,76 triliun dan kredit/pembiayaan mencapai sekitar Rp172,45 triliun [5],[6]. Dengan demikian, peningkatan kepercayaan dan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi BPR/BPRS memiliki relevansi tidak hanya bagi keputusan individu, tetapi juga bagi fungsi intermediasi sektor keuangan pada tingkat lokal.

Relevansi BPR/BPRS juga terlihat dari besarnya cakupan simpanan masyarakat yang berada dalam ekosistem penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Data LPS menunjukkan bahwa pada Juni 2024 total simpanan BPR mencapai sekitar Rp167,1 triliun dengan lebih dari 16,1 juta rekening. Pada periode yang sama, LPS menjamin sekitar 99,98% rekening BPR/BPRS atau lebih dari 15,7 juta rekening. Bahkan sampai Juni 2025, cakupan rekening BPR/BPRS yang dijamin LPS masih mencapai sekitar 99,97% atau 15,54 juta rekening [7],[8]. Besarnya cakupan tersebut menunjukkan bahwa BPR/BPRS merupakan bagian penting dari ekosistem perlindungan simpanan masyarakat, sehingga kualitas informasi yang diterima masyarakat sebelum menempatkan dana menjadi relevan dengan fungsi perlindungan dan kepercayaan publik yang menjadi bagian dari stabilitas sistem keuangan.

Namun, keberadaan skema penjaminan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan *information gap*. Masyarakat tetap perlu memahami informasi mengenai tingkat bunga atau imbal hasil, karakteristik produk, ketentuan penjaminan, batas maksimum nilai simpanan yang dijamin, serta kondisi yang menyebabkan suatu simpanan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penjaminan. LPS sendiri mensyaratkan adanya transparansi mengenai tingkat bunga penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin agar nasabah dapat mengetahui konsekuensi dari produk simpanan yang dipilih [8],[5],[9]. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya membutuhkan mekanisme penjaminan pada saat terjadi kegagalan bank, tetapi juga membutuhkan informasi yang dapat dipahami masyarakat sebelum keputusan menabung dibuat.

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang untuk mengatasi persoalan tersebut tanpa harus menambah kompleksitas layanan keuangan. Literatur menunjukkan bahwa *digital financial literacy* berkaitan dengan perilaku keuangan dan kesejahteraan finansial, sementara digitalisasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan keuangan [10]. [3] menunjukkan bahwa tingkat *digital financial literacy* berkaitan dengan perilaku menabung, sedangkan [11] menunjukkan hubungan antara *digital financial literacy*, perilaku keuangan digital, dan *financial well-being* di Indonesia. Temuan tersebut memberikan dasar bahwa persoalan literasi dapat diarahkan dari pendekatan edukasi konvensional menuju penyediaan informasi digital yang tersedia ketika masyarakat membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan.

Kecerdasan buatan selanjutnya membuka kemungkinan untuk membuat informasi tersebut lebih mudah dipahami, bukan sekadar lebih mudah diakses. AI dapat digunakan sebagai mekanisme *information translation* yang mengubah informasi keuangan yang bersifat teknis menjadi penjelasan yang lebih sederhana dan kontekstual sesuai kebutuhan pengguna [12]. Literatur mengenai layanan keuangan berbasis AI menunjukkan bahwa penerapan AI memiliki potensi memperluas akses terhadap layanan dan informasi keuangan, tetapi transparansi dan keterpahaman informasi tetap menjadi faktor penting dalam penerimaan pengguna. [13] menekankan pentingnya desain interaksi dalam layanan keuangan berbasis AI, sedangkan penelitian mengenai sistem *AI-empowered financial advisory* menunjukkan bahwa informasi yang tidak transparan dan sulit dipahami dapat menjadi hambatan bagi pengambilan keputusan pengguna.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan SIPANDAI (*AI-Assisted Financial Information Layer*) sebagai suatu model kebijakan digital, bukan sekadar aplikasi baru. SIPANDAI dirancang sebagai lapisan informasi yang berada di antara sumber informasi resmi BPR/BPRS dan masyarakat, kemudian menggunakan AI untuk membantu menerjemahkan informasi keuangan menjadi penjelasan yang lebih sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami. Posisi ini penting karena SIPANDAI tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi OJK, LPS, maupun manajemen BPR/BPRS, tidak menjadi lembaga pemeringkat, dan tidak memberikan keputusan investasi atau keputusan penempatan dana. Fungsi utamanya adalah mengurangi kesenjangan informasi sehingga masyarakat dapat memahami pilihan simpanan sebelum mengambil keputusan**.** Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat literasi sekaligus menjaga agar peningkatan inklusi keuangan menghasilkan keputusan keuangan yang lebih terinformasi.

Jurnal Riset dan Inovasi Bisnis Digital (JRIBD)
Volume 1, Issue 2, Juli 2026, Hal. 31-40
E-ISSN: 3125-0394 (Media Online)
DOI: https://doi.org/10.66785/jribd.v1i2.242

2. STUDI LITERATUR

2.1 Literasi Keuangan dan Minat Menabung

Literasi keuangan merupakan kemampuan yang penting dalam membantu masyarakat memahami dan mengambil keputusan terkait produk keuangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, khususnya digital financial literacy, memiliki hubungan dengan perilaku keuangan dan perilaku menabung masyarakat Indonesia [3],[2],[10]. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi dan konsekuensi dari keputusan keuangan.

Dalam penelitian ini, literasi keuangan ditempatkan sebagai kemampuan awal masyarakat, sedangkan minat menabung merupakan outcome perilaku yang ingin diperkuat. Hubungan keduanya menjadi dasar untuk mengembangkan intervensi yang tidak hanya memberikan akses terhadap informasi, tetapi juga membantu masyarakat memahami informasi tersebut.

2.2 Digital Financial Literacy dan Kesenjangan Informasi

Digitalisasi memungkinkan informasi keuangan tersedia dengan lebih cepat dan luas. Namun, ketersediaan informasi secara digital tidak selalu berarti informasi tersebut mudah dipahami. Masyarakat dapat mengakses informasi produk, bunga, ketentuan simpanan, maupun informasi penjaminan melalui internet, tetapi bahasa teknis dan banyaknya informasi dapat menciptakan information gap. Penelitian mengenai digital financial literacy menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan menggunakan informasi digital berkaitan dengan perilaku keuangan yang lebih baik [3],[4].

Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian penelitian ini bukan hanya akses terhadap informasi, tetapi kemampuan memahami informasi. SIPANDAI ditempatkan untuk mengisi ruang tersebut dengan menyediakan lapisan informasi yang menerjemahkan informasi keuangan menjadi bahasa yang lebih sederhana bagi masyarakat.

2.3 BPR/BPRS dan Perlindungan Simpanan

BPR dan BPRS memiliki posisi strategis dalam mendukung pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat pada tingkat lokal. OJK melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024–2027 menempatkan penguatan literasi, inklusi, digitalisasi, serta peningkatan kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan industri tersebut [5].

Pada sisi perlindungan, simpanan masyarakat pada BPR/BPRS termasuk dalam ekosistem penjaminan LPS. Besarnya jumlah rekening yang dijamin menunjukkan bahwa BPR/BPRS memiliki hubungan langsung dengan perlindungan dana masyarakat dalam jumlah besar. Karena itu, informasi mengenai karakteristik simpanan dan ketentuan penjaminan perlu dapat dipahami masyarakat sebelum mereka mengambil keputusan menabung [7],[8].

Posisi tersebut memberikan dasar bagi SIPANDAI untuk berfungsi sebagai penghubung antara informasi resmi mengenai BPR/BPRS dan pemahaman masyarakat, tanpa mengambil alih fungsi regulator maupun lembaga penjamin.

2.4 Artificial Intelligence sebagai Lapisan Informasi

Perkembangan Artificial Intelligence memungkinkan informasi yang kompleks diproses dan dijelaskan melalui interaksi bahasa yang lebih natural. Dalam sektor keuangan, penelitian mengenai AI-powered financial advisory dan explainable AI menunjukkan pentingnya transparansi, interpretabilitas, dan kemampuan sistem menjelaskan informasi kepada pengguna [13],[14].

Berbeda dengan penggunaan AI untuk prediksi risiko atau pemberian rekomendasi investasi, SIPANDAI menempatkan AI pada fungsi yang lebih sederhana, yaitu menjelaskan informasi keuangan. AI digunakan untuk membantu masyarakat memahami informasi BPR/BPRS, bukan untuk menentukan BPR/BPRS mana yang harus dipilih.

Jurnal Riset dan Inovasi Bisnis Digital (JRIBD)
Volume 1, Issue 2, Juli 2026, Hal. 31-40
E-ISSN: 3125-0394 (Media Online)
DOI: https://doi.org/10.66785/jribd.v1i2.242

2.5 Research Gap

Literatur telah menunjukkan tiga temuan penting: (1) literasi keuangan berkaitan dengan perilaku menabung, (2) digitalisasi memperluas akses terhadap informasi keuangan, dan (3) AI memiliki kemampuan untuk memproses dan menjelaskan informasi keuangan. Namun, ketiga pendekatan tersebut masih relatif terpisah.

Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui SIPANDAI (AI-Assisted Financial Information Layer), yaitu model informasi digital yang menghubungkan informasi BPR/BPRS dengan masyarakat melalui AI sebagai mekanisme penjelasan. Posisi SIPANDAI bukan sebagai aplikasi transaksi, lembaga pemeringkat, maupun pengambil keputusan keuangan, tetapi sebagai lapisan informasi sebelum masyarakat mengambil keputusan menabung.

Tabel 1. Research Gap dengan penelitian sebelumnya

Literatur Sebelumnya	Fokus utama	Keterbatasan / celah	SIPANDAI
Financial literacy	Pengetahuan dan kemampuan individu dalam mengambil keputusan keuangan, termasuk perilaku menabung [3],[16].	Literasi tidak dengan sendirinya menyediakan informasi aktual dan mudah dipahami mengenai pilihan lembaga/produk keuangan.	Menghubungkan literasi keuangan dengan informasi aktual BPR/BPRS sebelum keputusan menabung.
Digital financial literacy	Kemampuan memahami dan menggunakan informasi serta layanan keuangan melalui kanal digital; berkaitan dengan perilaku menabung [2],[3],[10].	Digitalisasi memperluas akses informasi, tetapi informasi yang tersedia secara digital belum tentu mudah dipahami oleh masyarakat awam.	Mengubah informasi keuangan digital menjadi penjelasan yang lebih sederhana melalui AI.
Digital banking / financial services	Mempermudah akses, transaksi, dan penggunaan layanan keuangan secara digital [17].	Fokus utama pada penggunaan dan transaksi layanan, bukan pada pemahaman masyarakat sebelum mengambil keputusan menabung.	Fokus pada tahap *pre-decision*: membantu masyarakat memahami informasi sebelum menabung.
AI in finance	Prediksi, *advisory*, otomatisasi, *risk assessment*, dan pengambilan keputusan berbasis data [13],[15].	Banyak penerapan AI diarahkan untuk membantu keputusan sistem atau institusi keuangan, bukan menerjemahkan informasi keuangan untuk masyarakat awam.	AI digunakan sebagai information explainer, bukan sebagai pengambil keputusan.
Explainable AI (XAI)	Meningkatkan transparansi, interpretabilitas, dan kepercayaan terhadap keluaran AI [14],[15].	Sebagian besar kajian berfokus pada *explainability* model analitik/AI dalam proses pengambilan keputusan keuangan.	Mengadaptasi prinsip *explainability* menjadi penjelasan informasi keuangan bagi masyarakat awam.
SIPANDAI	Literasi keuangan + informasi BPR/BPRS + AI-assisted explanation + saving intention.	—	Model kebijakan digital yang menjembatani informasi resmi dengan pemahaman masyarakat sebelum keputusan menabung.

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual (*conceptual/policy-oriented research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-preskriptif melalui studi kepustakaan (*desk research*). Penelusuran literatur akademik dilakukan melalui *Google Scholar*, sedangkan dokumen kebijakan dan informasi kelembagaan ditelusuri melalui sumber resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Cakupan tahun publikasi yang menjadi fokus adalah 2021–2026. Penelitian ini tidak membangun purwarupa atau aplikasi teknis SIPANDAI dan tidak mengumpulkan data primer melalui survei maupun wawancara, oleh karena itu penelitian ini tidak mengukur dampak SIPANDAI terhadap perilaku atau minat menabung.

Penelusuran dilakukan secara terarah dengan mengelompokkan kata kunci ke dalam tema literasi keuangan dan perilaku menabung (misalnya "*financial literacy*", "*digital financial literacy*", dan "*saving behavior*"), layanan keuangan digital dan kecerdasan buatan (misalnya "*AI in finance*", "*AI-powered financial advisory*", dan "*explainable AI*"), serta konteks kelembagaan dan perlindungan simpanan ("BPR", "BPRS", "LPS", "penjaminan

Jurnal Riset dan Inovasi Bisnis Digital (JRIBD)
Volume 1, Issue 2, Juli 2026, Hal. 31-40
E-ISSN: 3125-0394 (Media Online)
DOI: https://doi.org/10.66785/jribd.v1i2.242

simpanan", dan "literasi keuangan Indonesia"). Kata kunci tersebut digunakan sebagai kelompok tema pencarian, bukan sebagai protokol tinjauan sistematis dengan kalimat identik untuk setiap sumber.

Sumber dipertimbangkan apabila relevan dengan sekurang-kurangnya satu tema utama penelitian, yaitu (1) literasi keuangan dan perilaku menabung; (2) penyajian atau pemahaman informasi keuangan digital; (3) penggunaan AI untuk menjelaskan atau mendukung pemahaman informasi; atau (4) informasi resmi mengenai BPR/BPRS dan penjaminan simpanan. Literatur akademik diprioritaskan untuk membangun landasan konseptual, sedangkan dokumen resmi OJK/LPS digunakan untuk mendukung uraian kebijakan, kelembagaan, dan ketentuan yang berlaku. Sumber yang tidak berkaitan langsung dengan fokus tersebut atau tidak menyediakan informasi yang cukup untuk mendukung argumentasi tidak dijadikan landasan utama model.

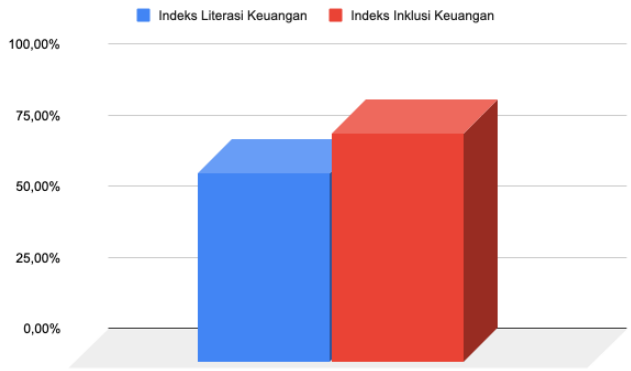
Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, informasi dari sumber terpilih dikelompokkan berdasarkan tema literasi keuangan, keterpahaman informasi, kepercayaan, minat menabung, AI sebagai penjelas informasi, serta perlindungan simpanan. Kedua, tema-tema tersebut dibandingkan untuk mengidentifikasi keterbatasan pendekatan yang telah dibahas dalam literatur, khususnya perbedaan antara akses digital, layanan transaksi, AI untuk prediksi atau rekomendasi, dan AI yang berfungsi menjelaskan informasi resmi kepada masyarakat. Ketiga, kesenjangan yang teridentifikasi disintesis menjadi kebutuhan fungsional model. Keempat, sintesis tersebut digunakan untuk merumuskan empat komponen SIPANDAI, alur kerjanya, batasan fungsi, dan rekomendasi implementasi kebijakan.

Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan konseptual dan bukan tinjauan sistematis, artikel ini tidak mengklaim telah melakukan pencarian menyeluruh terhadap seluruh publikasi yang tersedia. Jumlah rekaman hasil pencarian, jumlah sumber yang dieliminasi pada setiap tahap, dan penilaian risiko bias tidak dihitung sebagai bagian dari prosedur penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ditafsirkan sebagai sintesis konseptual yang menghasilkan model usulan, bukan bukti empiris tentang efektivitas SIPANDAI.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebutuhan Informasi Masyarakat terhadap BPR/BPRS

Kesenjangan antara indeks literasi keuangan sebesar 66,46% dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51% pada SNLIK 2025 [6] mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat telah menjadi nasabah atau pengguna layanan keuangan tanpa disertai kemampuan yang setara dalam memahami produk yang digunakan. Pada konteks BPR/BPRS, kondisi ini relevan mengingat besarnya basis dana masyarakat pada sektor tersebut, dengan total aset sekitar Rp230,38 triliun dan Dana Pihak Ketiga sekitar Rp161,76 triliun pada Juni 2025 [6].



Gambar 1. Indeks Literasi Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan
Sumber: OJK & BPS, 2025, data diolah

Berdasarkan sintesis literatur, kebutuhan informasi masyarakat terhadap BPR/BPRS tidak hanya menyangkut ketersediaan informasi, tetapi lebih pada empat aspek yang secara konsisten muncul dalam pembahasan literasi dan perlindungan simpanan: (1) karakteristik produk simpanan dan tingkat bunga atau imbal hasil yang ditawarkan; (2) status kelembagaan dan legalitas BPR/BPRS; (3) ketentuan penjaminan LPS, termasuk tingkat bunga penjaminan dan batas maksimum nilai simpanan yang dijamin; serta (4) kondisi yang menyebabkan suatu simpanan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penjaminan.

Jurnal Riset dan Inovasi Bisnis Digital (JRIBD)
Volume 1, Issue 2, Juli 2026, Hal. 31-40
E-ISSN: 3125-0394 (Media Online)
DOI: https://doi.org/10.66785/jribd.v1i2.242

Keempat aspek tersebut merupakan informasi yang secara normatif telah tersedia melalui kanal resmi OJK, LPS, maupun BPR/BPRS, tetapi belum selalu tersaji dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat awam sebelum mereka mengambil keputusan menabung.

4.2. Hubungan Konseptual antara Literasi Keuangan, Pemahaman Informasi, Kepercayaan, dan Minat Menabung

Sintesis atas penelitian terdahulu menunjukkan pola hubungan yang konsisten antara empat variabel utama yang menjadi perhatian penelitian ini. [3],[4] menunjukkan bahwa digital financial literacy berkaitan positif dengan perilaku menabung masyarakat Indonesia, sedangkan [11] menghubungkan digital financial literacy dengan perilaku keuangan digital dan financial well-being.

Berdasarkan pola tersebut, penelitian ini menyusun rangkaian hubungan konseptual sebagai berikut, literasi keuangan meningkatkan kemampuan individu dalam mencari dan menilai informasi keuangan, kemampuan tersebut, apabila didukung oleh ketersediaan informasi yang mudah dipahami, akan menghasilkan pemahaman informasi yang lebih baik mengenai produk dan lembaga simpanan. Pemahaman informasi selanjutnya berkontribusi pada terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap BPR/BPRS maupun terhadap skema penjaminan LPS dan kepercayaan tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan minat menabung.

Rangkaian hubungan ini tidak diuji ulang secara statistik pada penelitian ini, melainkan digunakan sebagai landasan logis yang menjelaskan mengapa intervensi pada titik pemahaman informasi sebagaimana ditawarkan SIPANDAI berpotensi memperkuat keseluruhan rangkaian tersebut.



Gambar 2. Hubungan Literasi Keuangan, Pemahaman Informasi, Kepercayaan dan Minat Menabung

4.3 Kesenjangan Informasi pada BPR/BPRS dan Ekosistem Penjaminan LPS

Analisis atas literatur dan dokumen kebijakan mengindikasikan bahwa kesenjangan informasi pada BPR/BPRS bersumber dari tiga faktor.

a. Pertama, faktor bahasa teknis, istilah-istilah seperti tingkat bunga penjaminan, batas maksimum simpanan yang dijamin, dan syarat pemenuhan penjaminan bersifat teknis dan tersebar pada dokumen atau ketentuan yang tidak selalu ditujukan untuk pembaca awam.
b. Kedua, faktor fragmentasi sumber informasi mengenai karakteristik BPR/BPRS berasal dari OJK, sedangkan informasi penjaminan berasal dari LPS, dan informasi produk berasal dari masing-masing BPR/BPRS, sehingga masyarakat perlu menghubungkan sendiri informasi yang tersebar tersebut sebelum dapat mengambil keputusan yang terinformasi.
c. Ketiga, faktor kesenjangan antara ketersediaan digital dan keterpahaman. Digitalisasi memperluas akses terhadap informasi, tetapi tidak dengan sendirinya membuat informasi tersebut lebih mudah dipahami [3],[4].

Ketiga faktor tersebut menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan informasi, melainkan pada ketiadaan lapisan yang menerjemahkan dan menghubungkan informasi resmi tersebut menjadi penjelasan kontekstual bagi masyarakat, celah inilah yang diisi oleh model SIPANDAI.

4.4 Model Konseptual SIPANDAI: Struktur dan Komponen

Berdasarkan kesenjangan yang diidentifikasi, penelitian ini merumuskan SIPANDAI sebagai model AI-Assisted Financial Information Layer yang terdiri atas empat komponen utama. Keempat komponen tersebut dirancang sebagai kerangka fungsional-konseptual, bukan spesifikasi teknis aplikasi, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

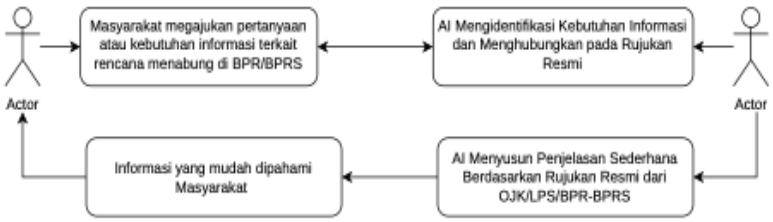
Jurnal Riset dan Inovasi Bisnis Digital (JRIBD)
Volume 1, Issue 2, Juli 2026, Hal. 31-40
E-ISSN: 3125-0394 (Media Online)
DOI: https://doi.org/10.66785/jribd.v1i2.242

Tabel 2. Komponen Model Konseptual SIPANDAI

Komponen	Fungsi Utama	Keterkaitan/Sumber
Lapisan Sumber Informasi Resmi	Menghimpun rujukan informasi dari sumber resmi dan sahih mengenai produk simpanan, status kelembagaan, serta ketentuan penjaminan, tanpa mengubah atau menggantikan substansi informasi tersebut.	OJK, LPS, dan publikasi resmi BPR/BPRS [5],[6],[7],[8].
Lapisan Penerjemahan AI (*AI Explanation Layer*)	Menerjemahkan informasi keuangan yang bersifat teknis menjadi penjelasan yang sederhana, kontekstual, dan sesuai dengan pertanyaan pengguna, mengikuti prinsip transparansi dan interpretabilitas.	Prinsip AI-assisted advisory dan explainable AI [13],[14],[15].
Lapisan Interaksi Masyarakat	Menyediakan format interaksi berbasis pertanyaan-jawaban kontekstual yang memungkinkan masyarakat menelusuri informasi sesuai kebutuhan, misalnya pertanyaan mengenai batas simpanan yang dijamin atau karakteristik produk tertentu.	Kebutuhan informasi masyarakat pada Bagian D.1
Lapisan Etika dan Batasan Fungsi	Menegaskan batasan bahwa SIPANDAI tidak memberikan rekomendasi investasi, tidak memeringkat kelembagaan, dan tidak menggantikan fungsi OJK maupun LPS; keluaran informasi diarahkan untuk mendukung, bukan menggantikan, pertimbangan dan tanggung jawab pengguna.	Prinsip AI sebagai information explainer, bukan pengambil keputusan (lihat Tabel 1)

4.5 Mekanisme Kerja SIPANDAI

Secara konseptual, mekanisme kerja SIPANDAI berlangsung dalam alur searah yang dapat diringkas sebagai berikut: (1) masyarakat mengajukan pertanyaan atau kebutuhan informasi terkait rencana menabung pada BPR/BPRS tertentu, (2) lapisan penerjemahan AI mengidentifikasi kebutuhan informasi tersebut dan menghubungkannya dengan rujukan pada lapisan sumber informasi resmi, (3) AI menyusun penjelasan yang sederhana dan kontekstual berdasarkan rujukan tersebut, tanpa menambahkan opini atau rekomendasi keputusan, dan (4) masyarakat menerima informasi yang lebih mudah dipahami sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan menabung, dengan tetap diarahkan untuk merujuk pada sumber resmi OJK/LPS/BPR-BPRS apabila memerlukan kepastian lebih lanjut.



Gambar 3. Diagram Mekanisme Kerja SIPANDAI

Alur ini menegaskan posisi SIPANDAI sebagai lapisan penjelas yang berada di antara sumber informasi resmi dan masyarakat, bukan sebagai sumber informasi baru maupun pengambil keputusan menabung.

4.6 Mekanisme Integrasi dengan Ekosistem Informasi LPS

Sebagai model kebijakan digital, SIPANDAI dirancang agar dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem informasi yang telah ada tanpa memerlukan perubahan kelembagaan yang besar. Integrasi tersebut dapat dilakukan pada tiga titik.

a. Pertama, pada tingkat sumber data, LPS dapat menyediakan data serta ketentuan penjaminan yang terstruktur sebagai rujukan bagi lapisan penerjemahan AI, sejalan dengan praktik transparansi yang telah disyaratkan LPS mengenai tingkat bunga penjaminan dan batas maksimum simpanan yang dijamin [8].

Jurnal Riset dan Inovasi Bisnis Digital (JRIBD)
Volume 1, Issue 2, Juli 2026, Hal. 31-40
E-ISSN: 3125-0394 (Media Online)
DOI: https://doi.org/10.66785/jribd.v1i2.242

b. Kedua, pada tingkat kanal informasi, keluaran SIPANDAI dapat ditempatkan pada kanal yang telah dikelola LPS, seperti portal informasi publik atau materi edukasi digital, sehingga tidak menambah kanal baru yang perlu dibangun dan dipelihara secara independen.
c. Ketiga, pada tingkat tata kelola, diperlukan mekanisme pemutakhiran berkala serta jalur eskalasi ke saluran resmi LPS/BPR-BPRS apabila pertanyaan pengguna berada di luar cakupan informasi yang tersedia. Mekanisme ini memungkinkan SIPANDAI berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, kanal informasi resmi yang telah dimiliki LPS.

4.7 Implikasi terhadap Pendekatan Perlindungan Simpanan LPS

Temuan-temuan pada Bagian 4.1 hingga 4.6 mengarah pada satu implikasi kebijakan utama. Cakupan penjaminan LPS terhadap rekening BPR/BPRS yang mencapai sekitar 99,97% atau 15,54 juta rekening pada Juni 2025 [8] menunjukkan bahwa fungsi penjaminan telah berjalan secara luas pada sisi perlindungan setelah terjadi kegagalan bank. Namun, besarnya cakupan tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa masyarakat memahami produk simpanan dan ketentuan penjaminan sebelum menempatkan dananya.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar LPS mempertimbangkan perluasan pendekatan perlindungan simpanan melalui dukungan informasi preventif, yaitu membantu masyarakat memahami pilihan simpanan sebelum keputusan menabung dibuat. SIPANDAI diajukan sebagai salah satu model konseptual yang dapat mendukung pendekatan tersebut. Integrasi dengan kanal dan sumber informasi yang telah ada berpotensi mengurangi kebutuhan membangun kanal yang sepenuhnya baru, tetapi klaim biaya rendah dan kemudahan replikasi belum dapat dipastikan tanpa analisis biaya, penilaian infrastruktur, pengaturan tata kelola data, dan uji coba teknis.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan literatur dan dokumen resmi yang ditelaah, kesenjangan antara indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan memberi konteks bagi pentingnya keterpahaman informasi. Namun, perbedaan indeks tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pengguna layanan keuangan tidak memahami produk yang digunakan.

Sintesis konseptual dalam penelitian ini menempatkan literasi keuangan, pemahaman informasi, kepercayaan, dan minat menabung sebagai aspek yang secara teoritis saling berkaitan. Literatur terdahulu menjadi dasar argumentasi hubungan tersebut, sedangkan penelitian ini tidak menguji hubungan antarvariabel maupun dampak SIPANDAI secara empiris. Kesenjangan informasi yang dirumuskan dalam artikel ini merupakan hasil interpretasi penulis atas sumber akademik dan dokumen kebijakan yang ditelaah.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini merumuskan SIPANDAI sebagai model AI-Assisted Financial Information Layer yang memposisikan AI sebagai penjelas informasi (*information explainer*), bukan penentu keputusan keuangan. Model ini dirancang untuk melengkapi, bukan menggantikan, fungsi OJK, LPS, maupun manajemen BPR/BPRS. Efektivitas model dalam meningkatkan pemahaman, kepercayaan, atau minat menabung masih perlu diuji melalui validasi ahli dan uji coba empiris.

5.2 Rekomendasi Kebijakan Utama: LPS Menjamin, SIPANDAI Membantu Masyarakat Memahami Apa yang Dijamin

Fungsi utama LPS adalah menjamin simpanan masyarakat, sebuah fungsi yang secara alamiah bersifat protektif-reaktif karena baru sepenuhnya terlihat manfaatnya ketika terjadi kegagalan bank. Penelitian ini tidak merekomendasikan perubahan atas fungsi penjaminan tersebut, tetapi merekomendasikan agar nilai dari fungsi penjaminan itu turut dirasakan masyarakat lebih awal, yaitu pada tahap sebelum keputusan menabung dibuat. Selama ini, ketentuan mengenai tingkat bunga penjaminan, batas maksimum nilai simpanan yang dijamin, dan syarat pemenuhan penjaminan telah tersedia secara resmi [8], tetapi belum tentu dipahami masyarakat awam pada saat mereka memilih tempat menabung.

Rekomendasi utama penelitian ini adalah agar LPS memperluas pendekatan perlindungan simpanan dengan mengembangkan atau memfasilitasi lapisan informasi berbasis AI, sebagaimana dimodelkan melalui SIPANDAI, sehingga fungsi menjamin yang dimiliki LPS diimbangi dengan fungsi membantu masyarakat memahami apa yang dijamin. Dengan kata lain, LPS tetap menjalankan mandatnya sebagai lembaga penjamin, sementara SIPANDAI berperan menjelaskan kepada masyarakat produk, ketentuan, dan batas penjaminan tersebut, sehingga

Jurnal Riset dan Inovasi Bisnis Digital (JRIBD)
Volume 1, Issue 2, Juli 2026, Hal. 31-40
E-ISSN: 3125-0394 (Media Online)
DOI: https://doi.org/10.66785/jribd.v1i2.242

perlindungan simpanan tidak hanya hadir setelah risiko terjadi, tetapi juga hadir sebagai pemahaman yang mendasari keputusan menabung itu sendiri.

5.3 Arah Implementasi Kebijakan

Rekomendasi utama tersebut dijabarkan ke dalam lima arah implementasi kebijakan sebagai berikut:

a. LPS Mengembangkan Financial Information Layer untuk Masyarakat. LPS dapat mengembangkan atau memfasilitasi pengembangan lapisan informasi berbasis AI seperti SIPANDAI sebagai bagian dari ekosistem informasi resminya, melengkapi kanal edukasi dan publikasi yang telah ada, tanpa membentuk kelembagaan baru maupun mengubah mandat penjaminan yang dimiliki LPS.
b. Integrasi Informasi Resmi Lintas Lembaga. Diperlukan integrasi data dan informasi antara LPS, OJK, dan BPR/BPRS agar lapisan informasi tidak terfragmentasi. LPS dapat berperan sebagai simpul yang menghubungkan data penjaminan dengan informasi produk dan status kelembagaan dari OJK dan BPR/BPRS, sejalan dengan arah Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024–2027 [5].
c. AI Digunakan untuk Menjelaskan, Bukan Menentukan. Kebijakan perlu menegaskan batasan fungsi AI sebagai prinsip tata kelola: AI tidak memberikan rekomendasi investasi atau keputusan penempatan dana, tidak memeringkat kelembagaan, dan tidak menggantikan kewenangan OJK maupun LPS. Prinsip explainability dan transparansi [13],[14],[15] perlu menjadi acuan dalam menyusun pedoman etik penggunaan AI pada layanan informasi keuangan publik.
d. Mendorong Informed Saving Decision. Tujuan akhir kebijakan bukan sekadar transparansi informasi, melainkan peningkatan kualitas keputusan menabung masyarakat. LPS dapat mempertimbangkan indikator pemahaman informasi sebagai pelengkap indikator literasi dan inklusi keuangan yang telah diukur melalui SNLIK [6], sehingga keberhasilan program tidak hanya diukur dari luasnya akses, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami pilihan yang mereka ambil.
e. Implementasi Dilakukan secara Bertahap. Mengingat penelitian ini bersifat konseptual dan belum melalui pengujian empiris primer, implementasi SIPANDAI direkomendasikan dilakukan secara bertahap: dimulai dari validasi konseptual lebih lanjut, dilanjutkan dengan uji coba terbatas (pilot) pada sejumlah BPR/BPRS terpilih, evaluasi dan penyempurnaan tata kelola, sebelum diperluas ke ekosistem informasi LPS secara nasional.

Kelima arah implementasi tersebut merupakan penjabaran operasional dari satu gagasan inti, bahwa perlindungan simpanan akan lebih bermakna bagi masyarakat apabila kepastian yang dijamin oleh LPS diiringi dengan pemahaman yang memadai sejak sebelum keputusan menabung dibuat, dan SIPANDAI ditawarkan sebagai salah satu model untuk mewujudkan keseimbangan tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Universitas Mahkota Tricom Unggul dan PT. Dira Niaga Abadi yang telah membantu memberikan kontribusi kepada penelitian ini.

Referensi

[1] Prawana, I. “Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM“. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16-34, 2024
[2] Mubarokah, S., Sari, P. P., & Kusumawardhani, R. “The influence of digital financial literacy on saving behavior among Gen Z in Indonesia“. *Indonesian Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 2(5), 39–47, 2024.
[3] Rahayu, R., Ali, S., Aulia, A., & Hidayah, R. “The current digital financial literacy and financial behavior in Indonesian millennial generation“. *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 78–94, 2022.
[4] Febrianty, F., Yuliansyah, Y., Hamzah, R. S., & Annisa, M. L. “Gender issues in digital financial literacy and financial behavior among millennials“. *Jurnal Economia*, 20(1), 79–94, 2024.
[5] Otoritas Jasa Keuangan. “Roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS 2024–2027“. *OJK*, 2024.
[6] Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025“. *OJK & BPS*, 2025.
[7] Lembaga Penjamin Simpanan. “Data distribusi simpanan BPR semester I 2024“. *LPS*, 2024.
[8] Lembaga Penjamin Simpanan. “Laporan kelembagaan LPS triwulan IV 2024“. *LPS*, 2025.

Volume 1, Issue 2, Juli 2026, Hal. 31-40
E-ISSN: 3125-0394 (Media Online)
DOI: https://doi.org/10.66785/jribd.v1i2.242

[9] Bank Indonesia. "Inklusi dan literasi keuangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat". *Bank Indonesia*, 2026.
[10] Wulandari, S. N., Riswandi, R., & Pratama, A. "Pengaruh digital financial literacy dan financial socialization terhadap saving behavior dengan self-control sebagai variabel intervening pada gen z di DKI Jakarta". *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 423-437, 2025.
[11] Dewi, C. S., Putri, A., & Situmorang, S. L. "Role of Digital Financial Literacy and Digital Financial Behavior on Financial Well-being in Indonesia". *West Science Business and Management*, 2(02), 293-303, 2024.
[12] Ashrafi, D. M. Managing consumers' adoption of artificial intelligence-based financial robo-advisory services: A moderated mediation model. Journal of Indonesian Economy and Business, 38(3), 2023.
[13] Zhu, H., Vigren, O., & Söderberg, I. L. Implementing artificial intelligence empowered financial advisory services: A literature review and critical research agenda. Journal of Business Research, 174, 114494, 2024.
[14] Černevičienė, J., & Kabašinskas, A. Explainable artificial intelligence (XAI) in finance: A systematic literature review. Artificial Intelligence Review, 57, 216, 2024.
[15] Weber, P., Carl, K. V., & Hinz, O. Applications of Explainable Artificial Intelligence in Finance—a systematic review of Finance, Information Systems, and Computer Science literature. Management Review Quarterly, 74, 867–907, 2024.
[16] Putra, I. G. S. "Unpacking the influence of parental and peer support on youth financial literacy and saving behavior in Indonesia". *Jurnal Siasat Bisnis*, 29(2), 194–210, 2025.
[17] Petra, J. C., & Pertiwi, D. Financial management behavior among students: The influence of digital financial literacy. International Journal of Financial and Investment Studies, 4(1), 9–16, 2023.
[18] Saragih, B. S. G., & Novitasari. Pengaruh literasi dan inklusi keuangan terhadap keputusan menabung di Bank Perkreditan Rakyat. Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ, 4(1), 2023.
[19] Jhonson, B., Andriani, R., Noviana, I., & Tamara, D. The influence of digital financial literacy on financial well-being through spending, saving, and investment behavior in Indonesia. Journal of Business Studies and Management Review, 6(2), 157–168, 2023.
[20] Kusumawardhani, R., Prihatin, W., Damanik, J. M., & Mubarokah, S. Digital financial literacy and consumer financial behavior in emerging markets: Evidence from Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 28(2), 2025.
[21] Lembaga Penjamin Simpanan. Laporan kelembagaan LPS triwulan II 2024. LPS, 2024.
[22] Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025. OJK, 2021.